

ABSTRAK

“PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM HAL PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK BERBADAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT”

**YOSEP SEFTIADI LUMBAN BATU
1687074**

Pada 15 Januari 2011, pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Persyaratan pembentukan partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 jauh lebih berat jika dibandingkan dengan UU sebelumnya. Salah satu contohnya ialah syarat jumlah pendiri partai politik. Pada UU No.2 Tahun 2008 mensyaratkan 50 WNI sebagai pendiri, sedangkan pada UU No.2 Tahun 2008 mensyaratkan 1020 WNI.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Teknik dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menelaah seluruh data dari instrumen penelitian. Perbandingan kesempatan membentuk partai politik sebagai badan hukum, penulis uraikan sebagai berikut: Pertama, UU No.2 Tahun 2011 tidak mengakomodir lagi keberadaan partai lokal. Kedua, UU No.2 Tahun 2011 memicu adanya pemborosan keuangan. Ketiga, UU No.2 Tahun 2011 menyulitkan berdirinya partai-partai yang muncul dari *grass root*. Keempat, UU No.2 Tahun 2011 lebih membatasi Jumlah Partai Politik.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis berkesimpulan, pertama, kesempatan membentuk partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 lebih dibatasi dibandingkan UU No.2 Tahun 2008. Kedua, berdasarkan UUD 1945 maka pengaturan dan pembatasan terhadap kebebasan berserikat harus didasarkan atas suatu alasan rasional dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Selain itu, penulis menyampaikan saran, pertama, Penulis menyarankan agar persyaratan berikutnya tidak hanya berupa syarat administratif saja. Kedua, pembatasan terhadap kebebasan berserikat tidak boleh bertentangan dengan amanat UUD 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan Rakyat.

ABSTRACT

"COMPARISON OF LAW NUMBER 2 OF 2008 CONCERNING POLITICAL PARTIES WITH LAW NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING POLITICAL PARTIES IN TERMS OF ESTABLISHMENT OF POLITICAL PARTIES WITH LEGAL RELATIONSHIP RELATED TO FREEDOM OF ASSOCIATION"

**YOSEP SEFTIADI LUMBAN BATU
1687074**

On January 15, 2011, the government passed Law No. 2 of 2011 concerning Amendments to Law No. 2 of 2008 concerning political parties. Requirements for the formation of political parties in Law No. 2 of 2011 are far more severe when compared to the previous law. One example is the requirement for the number of political party founders. In Law No.2 Year 2008 requires 50 Indonesian citizens as founders, whereas in Law No.2 Year 2008 requires 1020 Indonesian citizens.

This type of research is normative juridical. The nature of the research is analytical descriptive. This type of data uses secondary data. The approach used is the type of legislative approach, historical approach and conceptual approach. The technique in collecting data is literature study. Data analysis techniques examine all data from research instruments. Comparison of opportunities to form political parties as legal entities, the authors describe as follows: First, Law No. 2 of 2011 no longer accommodates the existence of local parties. Secondly, Law No.2 Year 2011 triggers financial wastage. Third, Law No.2 Year 2011 makes it difficult for parties to emerge from grassroots. Fourth, Law No.2 Year 2011 further limits the Number of Political Parties.

Based on the results of the study, the author concludes, first, the opportunity to form political parties in Law No. 2 of 2011 is more limited than Law No. 2 of 2008. Secondly, based on the 1945 Constitution, the regulation and restrictions on freedom of association must be based on a rational reason with the intention as regulated in Article 28J paragraph (2). In addition, the authors submit suggestions, first, the author recommends that the next requirement not only be in the form of administrative conditions. Second, restrictions on freedom of association must not conflict with the mandate of the 1945 Constitution that sovereignty is in the hands of the people.

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN ORIGINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
a) Teori Demokrasi	13
b) Teori Kebebasan Berserikat.....	14
2. Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian.....	17
a) Jenis Penelitian.....	17
b) Sifat Penelitian	17

c)	Jenis Data	18
d)	Pendekatan Penelitian	19
e)	Teknik Pengumpulan Data.....	20
f)	Metode Analisis Data.....	20
G.	Sistematika Penulisan.....	20

BAB II ASPEK HUKUM MENGENAI PARTAI POLITIK

A.	Pengertian Partai Politik	23
B.	Partai Politik Dalam Negara Demokrasi	26
C.	Pembentukan Partai Politik	30
D.	Badan Hukum Partai Politik.....	34

BAB III TINJAUAN TERHADAP HAK KEBEBASAN BERSERIKAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

A.	Pengertian Kebebasan Berserikat.....	41
B.	Kebebasan Berserikat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi	43
C.	Partai Politik sebagai bagian dari kebebasan berserikat	50

BAB IV PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM HAL

PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK BERBADAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEASAN BERSERIKAT

A. Perbandingan Kesempatan Membentuk Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik	59
B. Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Berserikat Warga Negara Dalam Membentuk Partai Politik.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113